

## ABSTRAK

### **Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Terhadap Pengembalian Barang Oleh Kurir Melalui Sistem Pembayaran *Cash On Delivery* Dalam Transaksi *E-Commerce***

Oleh : Ulfatul Khoiriyah, Dr. Zainuri, S.H., M.H., dan Imam Rofiqi, S.H., M.Kn.,

Transaksi jual beli secara online dinilai lebih efektif dan efisien, dimana seseorang dapat melakukan transaksi jual beli dimana saja dan kapan saja tanpa perlu para pihak bertatap muka. Transaksi yang dilakukan melalui *E-Commerce* berbeda dengan transaksi yang dilakukan di toko konvensional. Dalam transaksi *E-Commerce* yang disediakan, layanan sistem pembayaran *Cash On Delivery* (*COD*) memerlukan pihak ketiga yaitu jasa pengiriman (kurir).

Permasalahan penelitian ini meliputi pertanggungjawaban kurir pada transaksi *E-Commerce* dengan sistem *COD* apabila barang dikembalikan tanpa persetujuan kedua belah pihak dan perlindungan hukum pelaku usaha atas pengembalian barang. Dengan tujuan sebagai bahan kajian dan menganalisis pertanggungjawaban kurir pada transaksi *E-Commerce* apabila barang dikembalikan tanpa persetujuan kedua belah pihak dan perlindungan hukum pelaku usaha atas pengembalian barang pada transaksi *E-Commerce* dengan sistem *COD*.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, dimana penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan pertanggungjawaban hukum bagi kurir apabila barang dikembalikan tanpa persetujuan kedua belah pihak dan memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha atas pengembalian barang pada transaksi *E-Commerce* dengan sistem pembayaran *COD*.

Penelitian ini peneliti menghasilkan, pertama, berdasarkan delik yang terdapat dalam UUPK sangat penting untuk memberikan kejelasan dalam penegakan hukum, dan memastikan perlindungan yang efektif bagi pelaku usaha yang dilanggar haknya dalam konteks perlindungan hukum pelaku usaha terhadap pengembalian barang oleh kurir, kedua, dalam mengisi kekosongan hukum diperlukan pemerintah membuat aturan lebih lanjut mengenai mekanisme dan pengajuan sanksi atau ganti rugi terhadap konsumen yang tidak bertanggungjawab.

Berdasarkan hasil penelitian ini disarankan bagi pemerintah untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai transaksi *E-Commerce* dan aturan mengenai sistem pembayaran *COD* serta membuat aturan hukum terhadap konsumen yang tidak bertanggungjawab dan tidak ada itikad baik kepada pelaku usaha dalam transaksi *E-Commerce* dengan sistem pembayaran *COD*.

**Kata Kunci :** Perlindungan Hukum, Pengembalian barang, Kurir.

## ***ABSTRACT***

### **Legal Protection For Business Actors Against The Return Of Goods By Couriers Via The Cash On Delivery Payment System**

By : Ulfatul Khoiriyah, Dr. Zainuri, S.H., M.H., and Imam Rofiqi, S.H., M.Kn.,

Online buying and selling transactions are considered more effective and efficient, where someone can carry out buying and selling transactions anywhere and at any time without the need for the parties to meet face to face. Transactions carried out via *E-Commerce* are different from transactions carried out in conventional stores. Payment via *Cash On Delivery* is made directly by the seller and the buyer. However, in the *E-Commerce* transactions provided, the COD payment system service requires a third party, namely a delivery service (courier).

The problem of this research includes the responsibility of courier in *E-Commerce* transactions with the COD system if goods are returned without the consent of both parties and the legal protection of perpetrators for returning goods. With the aim of providing study material and analyzing the responsibility of couriers in *E-Commerce* transactions if goods are returned without the consent of both parties and the legal protection of business actors for returning goods in *E-Commerce* transactions using the COD system.

This research method uses a type of normative legal research with a statutory and regulatory approach, where this research was carried out with the aim of providing legal responsibility for couriers if goods are returned without the consent of both parties and providing legal protection for business actors for returning goods in *E-Commerce* transactions with a COD payment system.

This research result, firstly, based on the offenses contained in the UUPK which are very important to provide clarity in law enforcement, and ensure effective protection for business actors whose rights are violated in the context of legal protection for business actors against the return of goods by couriers, secondly, in filling the gap. The law requires the government to make further regulations regarding mechanisms and applications for sanctions of compensation against irresponsible consumers.

Based on the results of this research, it is recommended that the government provide an explanation to the public regarding *E-Commerce* transactions and the rules regarding the COD payment system as well as make legal regulations against consumers who are irresponsible and have no good faith towards business actors in *E-Commerce* transactions with the COD payment system.

**Keywords :** Legal Protection, return of goods, courier